

STAKEHOLDERS MAPPING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA GIRIMULYO KABUPATEN KARANGANYAR

Devi Martini, Satria Aji Imawan

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Girimulyo Tourism Village in Karanganyar Regency has natural, cultural, and culinary tourism potential, but its development remains suboptimal because it is still in the pioneering stage and faces challenges in governance, promotion, integrated tour packaging, and supporting facilities. This study aims to identify the stakeholders involved in tourism development in Girimulyo Tourism Village and analyze their positions and roles based on power-interest theory. The study employed a descriptive qualitative approach in Girimulyo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, with data collected through semi-structured interviews, observation, and document review, and validated through source and technique triangulation. The findings show that nine stakeholders from the government, business, and community sectors are involved and can be classified into three groups: (a) primary stakeholders, including Pokdarwis Girimulyo, Karang Taruna, local businesses and UMKM, and the village community; (b) key stakeholders, consisting of the Girimulyo Village Government and Pokdarwis; and (c) secondary stakeholders, including Disparpora, Dispermades, BUMDes, and PT Asuransi Sinar Mas. In the power-interest matrix, the Village Government and Pokdarwis are categorized as players, Disparpora as a context setter, local businesses and UMKM, Karang Taruna, and the community as subjects, and Dispermades, BUMDes, and PT Asuransi Sinar Mas as crowd.

Keywords: Stakeholder Mapping, Tourism Village, Stakeholder Roles, Power and Interest.

PENDAHULUAN

Definisi pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Kepariwisataan merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pariwisata merupakan sektor yang memberikan sumbangan sekitar 10% dari PDB global dan menyediakan 1 dari 10 lapangan kerja di dunia (UNWTO, 2023). Pariwisata berkelanjutan semakin dipandang sebagai pendekatan penting dalam pembangunan daerah karena tidak hanya berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan, penguatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat lokal. (Agustin & Ilyas, 2025).

Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan pilar pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB melalui pengembangan destinasi wisata unggulan, termasuk desa wisata (Hasibuan dkk., 2023). Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), terjadi fluktuasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia antara Tahun 2020-2024.



Gambar 1. Jumlah Kunjungan

Wisatawan di Jawa Tengah 2020-2024

Sumber: *Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah (2024)*

Perubahan jumlah kunjungan tersebut menunjukkan dinamika sektor

pariwisata yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan dan mendorong pengembangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pengelolaan potensi wilayah. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah daerah mengembangkan program seperti desa wisata dan kampung tematik guna memperkuat sektor pariwisata. Implementasinya dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota melalui kebijakan daerah yang mendorong inovasi serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Pengelolaan pariwisata tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan kerja sama antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Khoir, F., dkk, 2024). Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi penting karena pengembangan pariwisata menuntut keterlibatan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda dalam menunjang keberhasilan pengelolaan dan pengembangan destinasi (Hikmah dkk., 2021). Hal ini sesuai dengan Pasal

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi, tetapi juga diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang semakin giat mengoptimalkan potensi pariwisata lokal melalui inisiatif pembentukan desa wisata. Pengembangan pariwisata lokal di Kabupaten Karanganyar ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Perda ini mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026 dan menjadi landasan strategis pengembangan pariwisata yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan desa wisata.

Terdapat 24 desa wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar, salah satunya, yaitu Desa Wisata Girimulyo yang memiliki berbagai potensi wisata, seperti wisata alam dan *adventure*,

wisata kuliner, dan wisata budaya. Namun, dalam pengembangannya Desa Wisata Girimulyo masih belum optimal sehingga masih termasuk dalam kategori desa wisata rintisan atau belum maju. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi destinasi dan kapasitas tata kelola yang mendukung pengembangannya. Dengan demikian, persoalan utama pengembangan Girimulyo tidak hanya terletak pada potensi wisata, tetapi juga pada belum optimalnya konfigurasi peran *stakeholder* dalam mendorong pengembangan yang terpadu.

Berdasarkan data dari situs [Katalog.data.go.id](https://katalog.data.go.id) (2022), Desa Wisata belum memiliki kanal promosi resmi yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan kurangnya *branding* dan promosi yang menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan Desa Wisata Girimulyo sebagai destinasi unggulan. Kondisi ini tentu menurunkan visibilitas destinasi, terutama bagi generasi muda yang banyak bergantung pada media sosial saat mencari referensi wisata. Selain itu, informasi mengenai potensi dan kegiatan wisata yang tersedia belum tersampaikan secara konsisten kepada calon wisatawan.

Tabel 1. Data Sosial Media Desa Wisata Girimulyo

MEDIA SOSIAL	
1	<i>Youtube</i>
2	<i>Instagram</i>
3	<i>Tiktok</i>
4	Lainnya

Sumber: Situs Katalog.data.go.id (2022).

Permasalahan lain pada pengelolaan desa wisata Girimulyo terdapat pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, pada Bab 2 Deskripsi Kondisi Wilayah Perdesaan juga menyatakan bahwa terdapat kendala dalam Pengembangan Kawasan Pedesaan Agrowisata Ngargoyoso, termasuk di dalamnya Desa Wisata Girimulyo, yaitu:

“Meskipun populer di tingkat lokal, promosi Ngargoyoso di tingkat nasional dan internasional masih terbatas. Branding wisata juga masih terpecah-pecah antar destinasi, belum terintegrasi dalam satu citra besar”. (Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2025).

Selain itu, di Desa Wisata Girimulyo juga belum terdapat paket wisata terintegrasi, sehingga kegiatan wisata masih berjalan secara parsial. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 60 Tahun 2025, bagian hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata Ngargoyoso, yang menyatakan bahwa:

“Kurangnya integrasi antar destinasi sehingga wisatawan cenderung hanya mengunjungi satu atau dua lokasi saja tanpa melanjutkan ke destinasi lain”.

“Minimnya paket wisata terpadu yang menggabungkan atraksi alam, budaya, dan agro sehingga wisatawan kurang mendapatkan pengalaman menyeluruh”.

Menurut Widyaningsih dkk. (2022) Ketiadaan media sosial dan lemahnya promosi tidak hanya menurunkan eksistensi Desa Wisata Girimulyo, tetapi juga memengaruhi persepsi atas kualitas dan daya tarik destinasi. Selain itu, fasilitas pendukung yang minim menjadi penghambat utama wisata alam lokal (Adlani & Purnaweni, 2025). Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu penelitian yang menyatakan bahwa objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang merupakan destinasi wisata andalan Desa Wisata Girimulyo dikategorikan dalam kategori "Kurang Menarik" (Pratidina, 2022). Kriteria ini diberikan karena kondisi objek wisata yang dinilai kurang indah, menurun tingkat keasriannya, dan keunikannya mulai berkurang akibat kurangnya pemeliharaan.

Tabel 2. Kelas, kategori dan kriteria daya tarik wisata di Kabupaten Karanganyar

Kelas	Kategori	Kriteria Daya Tarik wisata	Nama tempat wisata
1	Sangat menarik	Objek wisata masih asri, unik, khas, terpelihara dengan baik sehingga terlihat indah.	Grojogan sewu, Air terjun Jumog, telaga madirda.
2	Menarik	Objek wisata indah, unik, khas, buatan, terpelihara dengan baik walaupun sudah tidak asri lagi.	Candi cetho, Candi Sukuh, Sekipan, De Tjolomadoe
3	Cukup Menarik	Objek wisata cukup indah, unik, khas, serta cukup terpelihara, walaupun sudah tidak asri lagi.	Agro wisata Sondokoro, Astana Giribangun
4	Kurang Menarik	Objek wisata kurang indah, kurang keasrian serta keunikan juga ikut berkurang dan kurang terpelihara	Air terjun Parang Ijo.

Sumber: Pratiidina, FLA. (2022)

Pengembangan desa wisata menjadi strategi untuk mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan *stakeholder* secara aktif pada tahap perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi (Rahmawati, A & Maron, A, 2024). Prinsip yang ditekankan meliputi partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, pemerataan manfaat, dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, LSM, dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo dari sisi peran *stakeholder* belum optimal. Hal ini

terlihat dari lemahnya *branding* dan promosi, belum adanya paket wisata yang terstruktur, serta kondisi objek wisata yang kurang terawat dan minim fasilitas. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengidentifikasi peran dan klasifikasi *stakeholder* agar posisi, fungsi, serta tingkat pengaruh dan kepentingan setiap aktor dapat diketahui secara jelas sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan lebih terarah dan efektif (Alvianita, V., dkk, 2024).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penelitian tentang *stakeholder* pariwisata telah banyak dilakukan, tetapi penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan analisis *power and interest* dari Ackerman dan Eden (2011) yang dipadukan dengan pola keterlibatan *Triple Helix*. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika kekuatan, kepentingan, dan posisi *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo dan menganalisis posisi mereka berdasarkan tingkat *power dan interest*.

KAJIAN TEORI

a. *Stakeholder*

Menurut Maryono, dkk (2005) dalam Astuti dkk. (2023), *Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) *Stakeholder* Primer

Stakeholders primer adalah pihak yang mengalami dampak langsung, baik positif atau negatif, dari suatu rencana serta punya keterkaitan kepentingan erat dengan aktivitas itu

2) *Stakeholder* Kunci

Stakeholders kunci merupakan pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting berkaitan kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan. *Stakeholders* tersebut merupakan elemen eksekutif dalam organisasi.

3) *Stakeholder* Sekunder

Stakeholders sekunder adalah *stakeholders* yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana. Namun, mempunyai kepedulian besar terhadap proses pengembangan.

b. *Stakeholders Mapping*

WHO (2007) mendefinisikan *stakeholders mapping* adalah sebuah teknik yang bisa dipergunakan untuk

mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dari sebuah kegiatan. Proses identifikasi dan pemetaan peran *stakeholder* merupakan langkah penting dalam pengembangan desa wisata (Rahmawati dkk., 2025). Pada penelitian ini digunakan teknik *stakeholders mapping*, yaitu *power vs interest grid* untuk mengetahui klasifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo.

Teknik *power vs interest grid* dilakukan dengan menyusun *stakeholder* pada matriks kepentingan (*interest*) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan kekuasaan (*power*) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut Widyaningrum, dkk (2024). Matriks *power versus interest grid* membagi *stakeholder* menjadi empat meliputi, *subject*, *players*, *context setter*, dan *crowd* Widyaningrum, dkk (2024).

1) Subjek (*Subject*): Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah.

- 2) Pemain Kunci (*Players*): Kelompok ini memiliki baik kepentingan tinggi maupun pengaruh tinggi.
- 3) Pengikut Lain (*Context Setters*): Pemangku kepentingan dalam kategori ini memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah.
- 4) Pendukung (*Crowd*): Kelompok ini memiliki kepentingan rendah dan pengaruh rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis posisi dan peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar. Informan dipilih secara *snowball sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan, otoritas, dan pengetahuan terhadap pengelolaan desa wisata, yang mencakup unsur pemerintah desa, OPD terkait, Pokdarwis, BUMDes, pelaku usaha lokal, Karang Taruna, masyarakat, dan pihak swasta mitra. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi triangulasi. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Stakeholders

Terdapat 9 *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Girimulyo. *Stakeholders* tersebut terbagi dalam 3 sektor, yaitu pemerintah terdiri dari Pemerintah Desa Girimulyo, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya dari sektor dunia usaha, antara lain pelaku usaha lokal dan UMKM, PT Asuransi Sinar Mas (ASM), dan BUMDes Girimulyo. Terakhir dari sektor LSM dan masyarakat sipil, yaitu Pokdarwis Girimulyo, Karang Taruna Desa Girimulyo, dan Masyarakat Desa Girimulyo.

Seluruh *stakeholders* tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, menurut Maryono, dkk (2005) identifikasi *stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder.

1) Stakeholder Primer

Stakeholders primer adalah pihak yang mengalami dampak langsung, baik positif atau negatif, dari suatu rencana serta punya keterkaitan kepentingan erat dengan aktivitas itu.

Pada pengelolaan Desa Wisata Girimulyo, yang termasuk ke dalam *stakeholders* primer adalah pelaku usaha lokal dan UMKM, Pokdarwis Girimulyo, Karang Taruna Desa Girimulyo, dan Masyarakat Desa Grimulyo. Hal ini menunjukkan bahwa dampak langsung pengembangan pariwisata terutama dirasakan oleh aktor pelaksana utama aktivitas wisata dan penerima manfaat ekonomi maupun sosial.

2) *Stakeholder Kunci*

Stakeholders kunci merupakan pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting berkaitan kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan. *Stakeholders* tersebut merupakan elemen eksekutif dalam organisasi. Pada pengelolaan Desa Wisata Girimulyo, yang termasuk ke dalam *stakeholders* kunci adalah Pemerintah Desa Girimulyo dan Pokdarwis Desa Girimulyo. Penetapan Pemerintah Desa dan Pokdarwis sebagai stakeholder kunci mencerminkan posisi strategis keduanya dalam mengendalikan arah kebijakan, pengorganisasian kegiatan, dan

pengambilan keputusan yang menentukan keberlanjutan pengembangan desa wisata.

3) *Stakeholder Sekunder*

Stakeholders sekunder adalah *stakeholders* yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana. Namun, mempunyai kepedulian besar terhadap proses pengembangan. Pada pengelolaan Desa Wisata Girimulyo, yang termasuk ke dalam *stakeholders* sekunder adalah Disparpora Kabupaten Karanganyar, Dispermades Kabupaten Karanganyar, PT Asuransi Sinar Mas (ASM), dan BUMDes Girimulyo.

Stakeholder sekunder terbatas pada OPD, BUMDes, dan perusahaan asuransi, tanpa keterlibatan perguruan tinggi atau investor besar sehingga dukungan pendanaan, jaringan pemasaran, dan transfer pengetahuan masih minim. Secara normatif, BUMDes berpotensi menjadi aktor primer bahkan kunci dalam pengelolaan usaha desa wisata, namun di Girimulyo perannya masih sebatas sekunder karena belum mengintegrasikan usaha-usaha lokal ke dalam model bisnis desa wisata yang terpadu.

B. *Matriks Power vs Interest Grid*

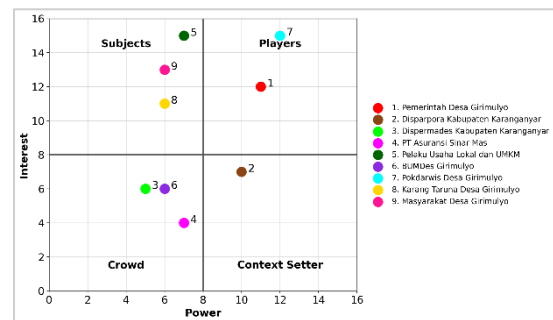
Teknik *power vs interest grid* dilakukan dengan menyusun *stakeholder*

pada matriks sesuai kepentingan (*interest*) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan kekuasaan (*power*) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut. Matriks *power versus interest grid* membagi *stakeholder* menjadi empat kuadran meliputi, *subject*, *players*, *context setter*, dan *crowd*.

Power dan *interest* setiap *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Girimulyo harus dipetakan secara jelas agar setiap pihak mendapat peran yang sesuai dengan pengaruh dan kepentingannya dalam mendukung keberlanjutan desa wisata. Menurut Golder (2005), pemetaan *stakeholder* membantu mengidentifikasi minat *stakeholder* terhadap kebijakan atau program, mengenali potensi konflik atau risiko, membangun hubungan dengan *stakeholder*, serta mengurangi kemungkinan kegagalan kebijakan.

Matriks *power versus interest grid* merupakan representasi hasil penilaian terhadap *power* dan *interest* masing-masing *stakeholder*. Matriks ini terbagi menjadi empat kuadran yang mengasifikasikan *stakeholders* sesuai dengan *power* dan *interest* yang dimilikinya. Berikut adalah matriks

power versus interest grid dalam pengelolaan Desa Wisata Girimulyo.



Gambar 2. matriks *power versus interest grid* pengelolaan Desa Wisata Girimulyo

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan matriks *power vs interest grid* tersebut *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Subjek (Subject): Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah. Termasuk dalam kategori *subject* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo antara lain, Pelaku usaha lokal dan UMKM, Karang taruna Desa Girimulyo, dan Masyarakat Desa Girimulyo.

Stakeholder subjects memerlukan pelibatan aktif melalui penguatan kapasitas dan komunikasi. Pelaku usaha, Karang Taruna, dan

masyarakat berperan penting dalam layanan wisata, namun partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Keterbatasan kapasitas dan pemahaman *stakeholder* lokal dapat menyebabkan kontribusi yang belum optimal dalam pengembangan desa wisata, meskipun mereka memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberlanjutan destinasi (Rahmawati dkk., 2025).

- 2) **Pemain Kunci (*Players*):** Kelompok ini memiliki baik kepentingan tinggi maupun pengaruh tinggi. Termasuk dalam kategori *players* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo antara lain, Pemerintah Desa Girimulyo dan Pokdarwis Desa Girimulyo.

Pemerintah Desa dan Pokdarwis sebagai *players* memiliki kekuasaan dan kepentingan tinggi dalam pengelolaan desa wisata, namun efektivitas perannya belum sepenuhnya ditopang oleh dukungan promosi dan pendampingan teknis dari pemerintah kabupaten.

- 3) **Pengikut Lain (*Context Setters*):** Pemangku kepentingan dalam kategori ini memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah.

Termasuk dalam kategori *context setter* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo adalah Disparpora Kabupaten Karanganyar.

Disparpora Karanganyar sebagai *context setter* berperan membentuk kebijakan dan standar kualitas, namun belum optimal karena keterbatasan kesiapan desa. Dukungan perlu diperkuat melalui koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan kesiapan desa.

- 4) **Pendukung (*Crowd*):** Kelompok ini memiliki kepentingan rendah dan pengaruh rendah. Termasuk dalam kategori *crowd* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo antara lain, Dispermades Kabupaten Karanganyar, BUMDes Girimulyo, PT Asuransi Sinar Mas (ASM).

KESIMPULAN

1. Terdapat 9 *Stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo yang terdiri dari sektor pemerintah, dunia usaha, dan LSM serta masyarakat setempat. *Stakeholder* tersebut diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan

stakeholder sekunder atau pendukung. *Stakeholder* primer meliputi Pokdarwis, Karang Taruna, pelaku usaha lokal dan UMKM, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam operasional. *Stakeholder* kunci adalah Pemerintah Desa dan Pokdarwis yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. *Stakeholder* sekunder meliputi Disparpora, Dispermades, BUMDes, dan PT Asuransi Sinar Mas yang berperan sebagai pendukung.

2. Identifikasi *stakeholder* berdasarkan matriks *power versus interest grid* mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi empat, yaitu *players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*. Pemerintah Desa dan Pokdarwis berada pada *players*, Disparpora pada *context setters*, pelaku usaha, Karang Taruna, dan masyarakat pada *subjects*, serta Dispermades, BUMDes, dan PT Asuransi Sinar Mas pada *crowd*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholder* belum sepenuhnya seimbang. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara kepentingan dan pengaruh, di mana aktor lokal sudah aktif dalam

operasional tetapi belum memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan sehingga pengembangan desa wisata belum berjalan optimal.

SARAN

1. Pemerintah Desa dan Pokdarwis perlu memperkuat partisipasi pelaku usaha, UMKM, Karang Taruna, dan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui forum rutin dan musyawarah inklusif agar kesenjangan pengaruh dapat berkurang.
2. Pengelola desa wisata perlu menyusun paket wisata terintegrasi yang siap dipasarkan, disertai penguatan SDM, pengembangan promosi resmi, serta penyediaan informasi di lokasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas promosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Widyaningrum, A. (2024). *Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi)* (A. Widyaningrum, N. Retnandari, & N. Susanto, Ed.; 1 ed.). Gadjah Mada University Press.
- Astuti, R., Astuti, R., & Rahman, A. (2023). *Stakeholders Mapping Pengelolaan Wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo*. *Journal of Public Policy and Management Review*.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41392>
- Hikmah, N., Larasati, E., Purnaweni, H. and Yuniningsih, T. (2021) "Collaboration of stakeholders in the development of ecotourism of Tangkahan village in Pulang Pisau regency of Central Borneo", *Management and Entrepreneurship*: Vol 2(16), Hal. 31-41. doi: <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-1/16-03>.
- Rahmawati, R., Purnaweni, H., Warsono, H., & Yuniningsih, T. (2025). *Identification and mapping of stakeholder roles in the development of local wisdom-based tourism villages in Cikolelet Tourism Village, Serang, Indonesia*. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 1260–1272. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4748>
- Agustin, A. E., & Ilyas. (2025). Pengembangan Desa Wisata Sriwulan Dalam Mendukung Agenda Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 8(1), 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v8i1.64147>
- Hasibuan, I., Mutthaqin, S., Erianto, R., & Harahap I. (2023). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2).
- Khoir, F., Maesaroh., Subowo, A. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Aksesibilitas Desa Wisata Berbasis Religi Ngatnyono. *Journal of Public Policy and Management Review*. Undip Repository. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/33264/>
- Rahmawati, A., & Marom, A. (2024). Analisis peran *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Serulingmas *Interactive Zoo*, Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Management and Public Policy*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.48756>
- Adlani, M. A., & Purnaweni, H. (2025). Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan Pantai Randusanga Indah Kabupaten Brebes. *Jurnal of Management and Public Policy Review*, 14(2), 1-15. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.48756>
- Alvianita, V., Subowo, A., & Santoso, R. S. (2024). Peran stakeholder dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Management and Public Policy*, 13(4), 424–439. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47343>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026.
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
- Permenpar No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.